

**PERLINDUNGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DARI SANKSI
PIDANA PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN
1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022**

DISERTASI

Oleh :

MUHAMMAD LATIP
NIM. 4001173009



**PROGRAM STUDI
S-3 HUKUM ISLAM**



PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

TAHUN 2022

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul :


**PERLINDUNGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DARI SANKSI
PIDANA PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN
1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022**

Oleh :

MUHAMMAD LATIP
NIM. 4001173009

**Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Disajikan Pada Ujian Terbuka
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan**

Medan, Nopember 2022
PEMBIMBING



Prof. Dr. H. Pagar, MA
NIP. 19581231 198803 1 016



Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum
NIP. 19680415 199703 1 008

PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul:

"Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah Dari Sanksi Pidana Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022", atas Nama **Muhammad Latip** NIM. **4001173009**, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan daripenguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk siding terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 25 Oktober 2022.

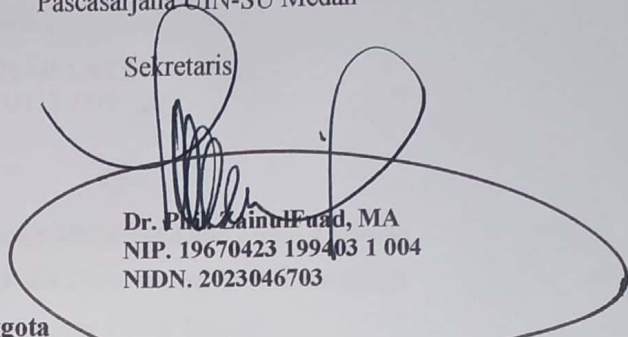
Panitia Ujian Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

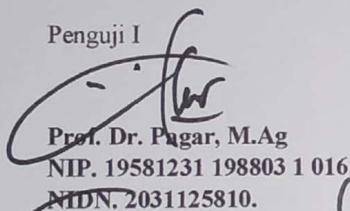
Sekretaris



Dr. Phd. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703

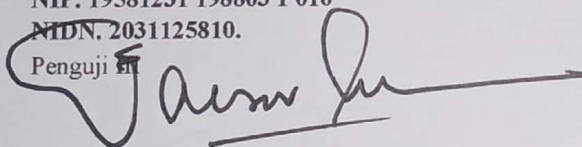
Anggota

Penguji I



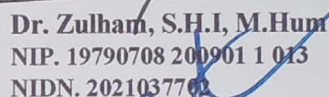
Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810.

Penguji II



Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A
NIP. 19640702 199203 1 003
NIDN. 202076402

Penguji II



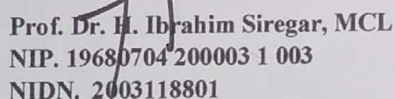
Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19790708 200901 1 013
NIDN. 2021037702

Penguji IV



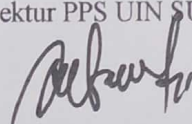
Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420 200901 1 009
NIDN.2020047602

Penguji V



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003
NIDN. 2003118801

Mengetahui
Direktur PPS UIN SU



Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP 196208141992203 1 003
NIDN 201486201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Latip
NIM : 4001173009
Tempat/Tgl Lahir : Jaring Halus, 06 Oktober 1969
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Dahlia Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul
**“PERLINDUNGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DARI SANKSI
PIDANA PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN
1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022”** adalah

benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 01 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Latip
NIM. 4001173009

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji syukur bagi Allah swt. yang telah menganugerahkan limpahan rahmat, berkah, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, selanjutnya salawat bertangkaikan salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan disertasi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa tingkat S3 untuk melengkapi syarat-syarat dalam menggapai gelar Doktor (Dr). Dalam penulisan disertasi ini, penulis banyak menemukan rintangan dan kesulitan, namun berkat pertolongan dari Allah serta bantuan, partisipasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almarhum Ayahanda Sulaiman yang telah berpulang ke rahmatullah pada tahun 2021 lalu dan Almarhumah ibunda tercinta Kartini , kemudian ayah mertua H. Jamaluddin Purba dan Almarhumah ibu mertua Hj. Kasturi Hasibuan yang telah bersusah payah mendidik penulis dan mendukung penuh studi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada mereka orangtua dan mertua penulis, semoga Allah membalas amal baik mereka. Selain itu juga penulis ucapkan terima kasih kepada abang penulis Hasyim dan adik Abdul Muis serta kakak dan adik ipar kemudian kemanakan penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah swt. dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang berguna di kemudian.

2. Ucapan terima kasih kedua terkhusus penulis ucapkan kepada *Syarîkatu Hayâtî* (pendamping hidup penulis) *Hj. Mardiah Purba, S.Ag, S.Pd* yang selalu bersama dan mendampingi penulis baik susah maupun senang serta bantuan yang tidak dapat disebutkan secara lisan hingga akhirnya penulis menyelesaikan disertasi ini. Semoga ikatan pernikahan ini terus kekal sampai ke surga kelak.
3. Dr. Dhiauddin Tanjung, MA., Selaku Ka. Prodi Huki yang telah memberikan masukan dan juga membimbing penulis mulai dari pengajuan proposal sampai selesai nya disertasi ini
4. Prof. Dr. H. Pagar. MAg, dan Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum, sebagai pembimbing penulis dalam bidang isi dan metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan disertasi ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, 01 Desember 2022
Penulis,

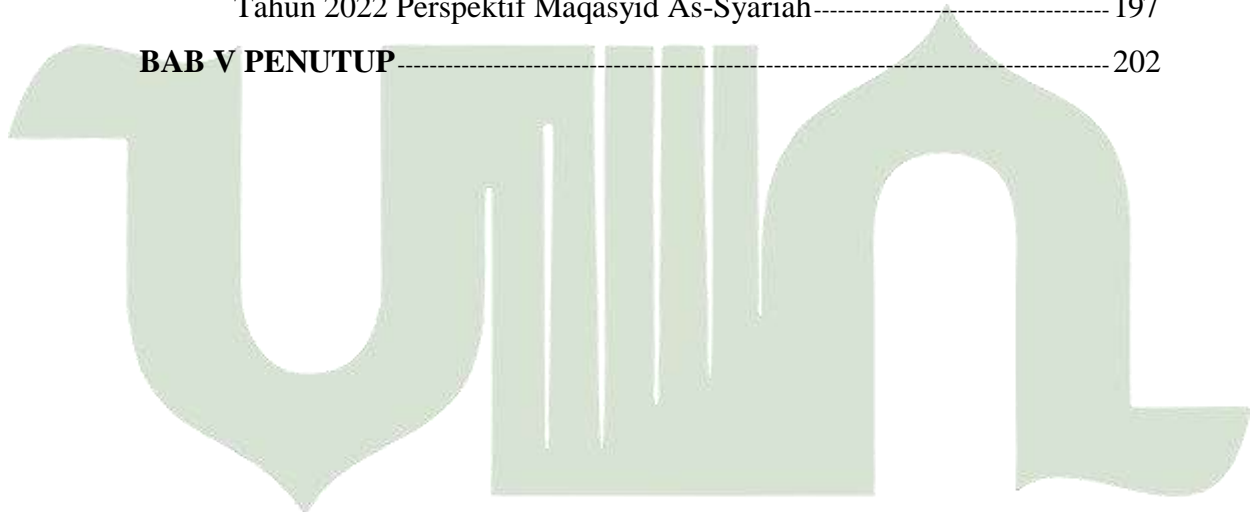
Muhammad Latip
NIM. 4001173009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
SURAT PERNYATAAN -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
ABSTRAK -----	vii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latarbelakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Penelitian Yang Relevan.....	40
H. Metode Penelitian.....	42
I. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA -----	46
A. Makna dan Hakikat Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Hukum Nasional.....	46
B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	68
C. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	75
D. Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah dari Sanksi Pidana.....	106
BAB III SANKSI PIDANA SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -----	117
A. Sanksi Pidana dan Tindak Pidana.....	117
B. Kedudukan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan ---	113

C. Beberapa Kasus Pidana terhadap Pegawai Pencatat Nikah-----	150
BAB IV KEDUDUKAN KETENTUAN PIDANA DALAM	
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 MENURUT	
PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022-----	152
A. Ketentuan Pidana Yang Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975-----	152
B. Analisis Kedudukan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022-----	176
C. Analisis Kedudukan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Undang – undang 13 Tahun 2022 Perspektif Maqashid As-Syariah-----	191
D. Analisis Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 Perspektif Maqasyid As-Syariah-----	197
BAB V PENUTUP-----	202



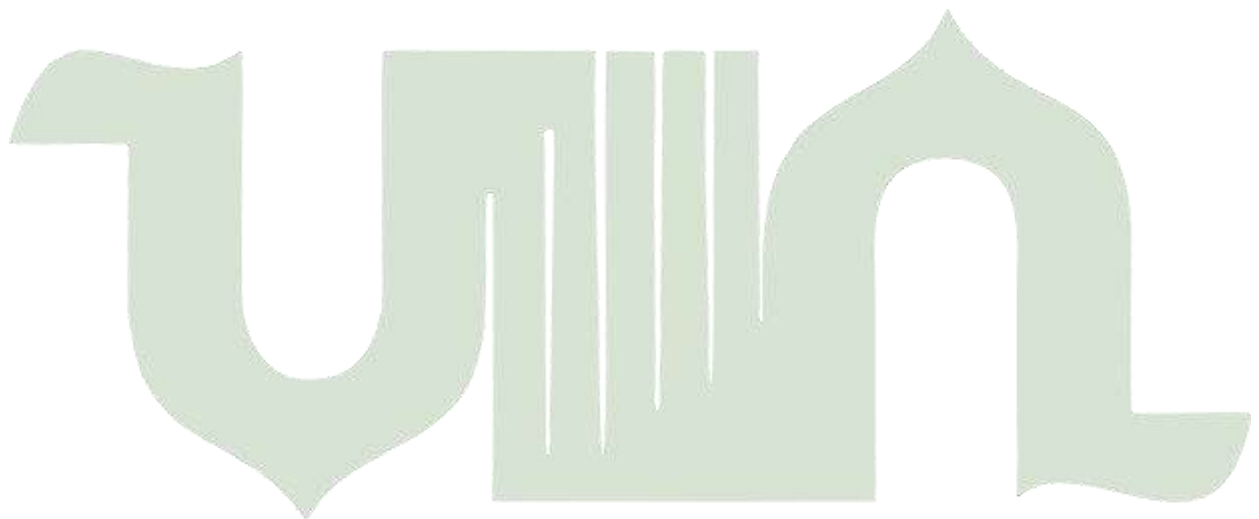
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

A. Kesimpulan202

B. Rekomendasi

.....204 Daftar Pustaka

.....205



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRAK



NAMA : Muhammad Latip
NIM : 4001173009
Prodi : Hukum Islam
Judul : PERLINDUNGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DARI SANKSI PIDANA PERSEPKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022

Sanksi pidana merupakan suatu instrumen yang penting didalam peraturan perundang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tersebut tidak dilanggar, sehingga semua undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat dan Negara diberi ketentuan sanksi agar undang-undang tersebut memiliki upaya paksa untuk ditaati, tidak terkecuali undang-undang perkawinan. Semangat pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang yang mengatur administrasi perkawinan dimulai pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, semangat tersebut berlanjut pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang menyatakan pada pasal 15 bahwa yang boleh memuat ketentuan pidana hanya Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga bagaimana kedudukan dan kepastian ketentuan pidana yang terdapat didalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kedudukan ketentuan pidana yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang (*State Approach*) dan doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua, bahan hukum primer yaitu berupa buku, artikel atau literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan ini dan bahan hukum sekunder berupa informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Anggota Komisi III DPR RI, Pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, Pejabat Mahkamah Agung dan Pakar Hukum. Bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan tehnik Triangulasi Teori dan Triangulasi Sumber Data untuk selanjutnya disimpulkan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang maka ketentuan pidana yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah batal dan tidak dapat diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. *Pertama* bahwa asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dapat diberlakukan dengan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011, maka secara asas hukum peraturan sebelumnya dinyatakan batal dan tidak dapat berlaku. *Kedua* kalimat “hanya dapat” yang terdapat didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 berarti mengenyampingkan hal lainnya selain yang telah disebutkan. *Ketiga*. Namun pernyataan bata atau tidak berlakunya suatu ketentuan didalam peraturan perundang-undangan harus dinyatakan secara tertulis, karena indonesia menganut asas hukum tertulis,

baik pada peraturan yang sejajar maupun peraturan yang di atasnya, hal itu yang terjadi pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini, setelah undang – undang nomor 1 tahun 1974 dirubah kedalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Jika dilihat dari tindakannya, dapat disimpulkan bahwa kriteria pernikahan yang dapat dipidana atau didenda terbagi kepada dua, yaitu *Pertama*, adalah adanya niat atau unsur kesengajaan, yaitu dari pasangan suami isteri, terlepas apapun niat atau motivasi mereka dalam melakukan tindakan tersebut, apalagi pasangan tersebut telah mengetahui adanya pasal atau ketentuan yang mengatur tentang anjuran mencatatkan pernikahan atau pemberitahuan kehendak nikah namun tetap melanggarnya, maka hal tersebut dapat dipidana, atau jarak tempuh antar kediaman mereka dengan Kantor Urusan Agama tidak jauh atau dapat ditempuh hanya beberapa jam, namun tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan pidana. *Kedua*, tindakan tersebut merugikan orang lain, dengan kata lain, bahwa orang yang dirugikan tersebut melaporkan atau mengadukan perbuatan yang merugikannya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diproses, karena ketentuan tersebut merupakan delik aduan, misalnya orang tua dari mempelai wanita merasa dirugikan karena anaknya tidak mendapatkan nafkah atau diperlakukan semena – mena dengan dalih bahwa perkawinan mereka tidak dicatatkan, maka orang tua dari mempelai wanita dapat mengadukan perbuatan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRACT



NAMA : Muhammad Latip
NIM : 4001173009
Prodi : Islamic Law
Judul : PROTECTION OF MARRIAGE REGISTER
EMPLOYEES FROM PERSPEKTIVE CRIMINAL
SANCTIONS GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 9 OF 1975 AND LAW NUMBER 13 OF
2022

Criminal sanctions are an important instrument in laws and regulations aimed at ensuring that these regulations or laws are not violated, so that all laws governing the interests of the community and the State are given sanctions provisions so that these laws have a forced effort to be obeyed, no exception. marriage law. The spirit of the inclusion of criminal provisions in the law that regulates marriage administration began in Law No. 22 of 1946 concerning Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation, this spirit continued in government regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. . In its development, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states in article 15 that only laws, Provincial and Regency/City regulations may contain criminal provisions, so what is the position and certainty of criminal provisions contained in government regulations? Number 9 of 1975?

This study aims to analyze and explain how the position of the criminal provisions contained in Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage according to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. So in its implementation, the researcher uses a juridical normative legal research method with a state approach and legal doctrine. The legal materials used in this study are divided into two, primary legal materials in the form of books, articles or literature related to the object of this problem and secondary legal materials in the form of information obtained from interviews with members of Commission III DPR RI, officials of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Supreme Court Officials and Legal Experts. The legal material will be analyzed using the Theory Triangulation and Data Source Triangulation techniques for further conclusions.

The results of this study explain that based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the criminal provisions contained in Government Regulation Number 9 of 1975 are null and cannot be enforced with various considerations. First, that the legal principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori can be enforced with the birth of law number 12 of 2011, then on a legal basis the previous regulation is declared null and void and cannot be applied. The two sentences "only can" contained in Law No. 12 of 2011 mean setting aside other things besides what has been mentioned. Third. However, the statement of brick or invalidity of a provision in the legislation must be stated in writing, because Indonesia adheres to the principle of written law, both in parallel regulations and the regulations above it, this is what happened in this government regulation number 9 of 1975, after the Law No. Law number 1 of 1974 was changed to law number 16 of 2019 concerning marriage.

If viewed from the actions, it can be concluded that the criteria for marriage that can be punished or fined are divided into two, namely: First, there is an intention or intentional element, namely from a husband and wife, regardless of their intentions or motivations in carrying out these actions, especially if the couple has knowing that there is an article or provision that regulates the recommendation to register a marriage or notification of a marriage wish but still violates it, then it can be punished, or the distance between their residence and the Office of Religious Affairs is not far or can be taken only a few hours, but not done, then the act can be categorized as criminal. Second, the action is detrimental to other people, in other words, that the injured person reports or complains about the detrimental action to the police, so that it can be processed, because this provision is a complaint offense, for example, the parents of the bride feel aggrieved because her child does not get living or being treated arbitrarily under the pretext that their marriage was not registered, then the parents of the bride can complain about the act.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

الملخص



الاسم : محمد السعيد

رؤم التعريف : 4001173009

برنامج الدراسة : الشريعة السالمية عنوان

: مكانة الأحكام الجزائية في اللئحة الحكومية رؤم 9 لسنة 1975

بموجب القوانون رؤم 12 لسنة 2011

تعتبر العقوبات الجزائية أداة مهمة في القوانين واللوائح التي تهدف إلى ضمان عدم انتهاك هذه اللوائح أو القوانين ، بحيث يتم فرض عقوبات على جميع القوانين التي تحكم مصالح المجتمع والدولة بحيث يكون لهذه القوانين جهد قسري للمبتال ال استثناء. قانون الزواج. بدأت روح إدراج الأحكام الجزائية في قانون تنظيم إدارة الزواج في القوانون رؤم 22 لسنة 1946 بشأن تسجيل الزواج والطلاق والصلح ، واستمرت هذه الروح في اللئحة الحكومية رؤم 9 لسنة 1975 بشأن تنفيذ القوانون رؤم 9 لسنة 1975 بشأن تنفيذ القوانون رقم. 1 لسنة 1974 في شأن الزواج. أثناء تطويره ، ينص القوانون رؤم 12 لعام 2011 بشأن إنشاء اللوائح التشريعية في المادة 15 على أن القوانين وأنظمة المقاطعة والوصاية / المدينة فقط هي التي يجوز أن تحتوي على أحكام جزائية ، نما هو موقف وتأكيده الأحكام الجزائية الواردة في اللوائح الحكومية؟ الرقم 9 من 1975؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وشرح موقف الأحكام الجزائية الواردة في اللئحة الحكومية رؤم 9 لسنة 1975 بشأن تنفيذ القوانون رؤم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ونقلاً للقوانون رؤم 12 لسنة 2011 بشأن إرساء التشريع. لذلك يستخدم الباحث في تنفيذ من هج بحث قانوني معياري قانوني بمنهج الدولة والعقوبة القانونية. ننوؤسم المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة إلى مادنون ، مواد قانونية أولية في شكل كتب أو مقالات أو أدبيات تتعلق بموضوع هذه المشكلة ومواد قانونية ثانوية في شكل معلومات تم الحصول عليها من المقابلات مع أعضاء اللجنة الثالثة ، ومسؤولون في وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا ، ومسؤولون في المحكمة العليا وخبراء قانونيون. سيتم تحليل المواد القانونية باستخدام نؤيبت نظرية التلخيص والتلخيص مصدر البيانات لمزيد من النتائج.

نوضح نتائج هذه الدراسة أنه بناء على القوانون رؤم 12 لعام 2011 بشأن إنشاء التشريع ، فإن الأحكام الجزائية الواردة في اللئحة الحكومية رؤم 9 لعام 1975 ال غبية وال يمكن تنفيذها باعتبار مخرنلة. أوأال ، يمكن تطبيق المبدأ القانوني له مع والددة القانون رقم 12 لعام 2011 ، ثم على أساس قانوني

، ثم إعلان اللائحة السابقة الغية وباطلة وال يمكن تطبيقها. الجملتان "نقط" الواردة في الأوزون رقم 12 لسنة 2011 تعزبان ننجية أشياء أخرى غير ما تم ذكره. ثالث. ومع ذلك ، يجب ذكر بيان الطوب أو بطلان أي حكم ني التشرييع كدائياً ، أن إندونيسيا تلزم بمبدأ الأوزون المكثوب ، ني لكل من اللوائح الموازية واللوائح أعلاه ، وهذا ما حدث في هذه اللائحة الحكومية رقم 9 عام 1975 ، بعد تعديل القانون

رقم 1 لسنة 1974 إلى القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج. إذا

نظرنا إلى الإجراءات ، يمكن الاستنتاج أن معاهير الزواج التي يمكن معاقبتها أو تغريمها تؤسّم إلى تُسمين ، وهم: أوال ، هناك نية أو عنصر مُصود ، أي من الزوج والزوجة ، بغض النظر عن نواياهما أو الدوافع في القيام بهذه الإجراءات ، خاصة إذا كان الزوجان يعلمان أن هناك مادة أو بنداً ينظم النوصية بشجيل الزواج أو الإخطار برغبة الزواج ولكن ال يزال يُنتهكها ، ني يمكن معاقبته ، أو المساندة بينهما. الإقامة ومكثب الشؤون الدينية ليس بعدياً أو يمكن أن يؤخذ بضع ساعات فقط ، لكن لم يتم القيام به، ني يمكن نصنيف الدغل على أنه إجرامي. ثالثاً ، يكون الإجراء ضاراً لأشخاص آخرين ، بمعنى آخر ، أن يبلغ الشخص المصاب أو يشكو من الإجراء الضار للشرطة ، بحيث يمكن معالجته ، أن هذا الحكم يعتبر جريمة شكوى ، على سبيل المثال ، والدي نشر العروس بالجزن أن طفلها ال يعيش أو يعمل بشكل تعسفي بحجة أن زواجهما غير مسجل ، وي يمكن لوالدي العروس الشكوى من هذا الدغل.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN